



Available at :

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>

EkoNika
Jurnal Ekonomi Universitas Kediri

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Sintang

Agnesia Hartini¹, Fusnika², Juri³

^{1,2,3}, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Email : agnesiahartini2014@gmail.com, fusnika804@gmail.com, jurisaputra85@gmail.com

ABSTRAK

Article History:

Received : 12-02-2022

Revised : 03-03-2022

Accepted : 25-03-2022

Keywords:

The role of local government;

Community; empowerment;

Creative economy enterprise.

Dewasa ini pemerintah mengajak masyarakat untuk memiliki usaha yang ditekuni. Usaha tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, terutama ditengah kondisi pandemi Covid 19, dimana daya beli masyarakat relatif menurun. Karena persaingan bisnis yang cukup ketat, menyebabkan UMKM sukar bertahan dalam jangka waktu lama. Kesulitan yang sering dialami adalah modal, pemasaran dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam membina masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang identik dengan Home Industry di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain: Observasi, Wawancara dan Studi dokumentasi. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sintang ada beberapa sektor. (1) Sektor kerajinan tangan berupa Tenun Ikat; (2) Sektor transportasi berupa jasa taksi Bandara Tebelian; (3) Sektor pariwisata berupa perhotelan.

ABSTRACT

Today the government invites the public to have a business that is occupied. This effort is expected to help the family's economy, especially in the midst of the Covid-19 pandemic, where people's purchasing power is relatively declining. Due to the tight business competition, it is difficult for MSMEs to survive in the long term. Difficulties that are often experienced are capital, marketing and the quality of the products produced. This study aims to determine the extent of the role of local governments in fostering communities that have Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which are identical to Home Industry in Sintang District. The method used in this research is descriptive qualitative. The instruments used for data collection include: Observation, Interview and Documentation Study. After conducting the research, the researcher found that the creative economy in Sintang District has several sectors. (1) The handicraft sector in the form of Ikat Weaving; (2) the transportation sector in the form of Tebelian Airport taxi services; (3) The tourism sector is in the form of hotels.

INTRODUCTION

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah

tersebut, dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran sertamasyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai undang-undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab, dan demokratis. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimanamasyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses sumberdaya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam menngembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain: peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, penghijauan lingkungan, perbaikanperumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Namun, dibalik itu semua, ketidakberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin, menyebabkan masalah ekonomi dan jugadisebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya, Penyediaan sarana dan prasarana dan pendidikan baik formal maupun informal, Berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Karena itu, konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat secara umum tidak jauh berbeda serta tidak terlepas dari pengembangan partipasi masyarakat itu sendiri, yang meliputi ciri dan karakter berdasarkan tiga hal utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumberdaya setempat (*local resources based*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Guna mewujudkan ketiga kriteria diatas, pemerintah mulai melirik industri kreatif berbasis UMKM sebagai alternatif roda penggerak ekonomi. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor home industry. Industri kreatif ini, sebagaimana terdapat dalam "Agribisnis Online" (2021) paling tidak meliputi 16 sub sektor, yaitu kuliner; arsitektur; desain produk; desain interior; desain grafis; film, animasi dan video; musik; fasion; seni pertunjukan; games dan aplikasi; radio dan televisi; seni rupa; periklanan; fotografi; serta penerbitan.

Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam sektor ekonomi lokal, regional, nasional bahkan global. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara yang maju dan tangguh. Ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (BEK).

Dalam Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan beberapa poin penting. *Pertama*, sektor industri kreatif memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. *Kedua*, menciptakan iklim bisnis positif yang berdampak pada sektor lain. *Ketiga*, membangun citra dan identitas bangsa seperti turisme, ikon nasional, membangun warisan budaya, dan nilai lokal. *Keempat*, berbasis kepada Sumber Daya yang terbarukan seperti ilmu pengetahuan dan peningkatan kreatifitas. *Kelima*, menciptakan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Terakhir, dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial.

Salah satu daerah di Indonesia yang mengembangkan perekonomian dengan ekonomi kreatif adalah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Pengembangan ekonomi kreatif tersebut memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah.

Dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di daerah, pemerintah dituntut untuk membentuk dan mengubah pola pikir masyarakat agar mampu mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas yang bukan hanya terbarukan, tetapi juga mengarah pada ide, talenta dan kreativitas

LITERATURE REVIEW

Istilah Ekonomi Kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Purnomo (2016), "ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreatifitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan".

Ekonomi Kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatifitas. Pemanfaatan Sumber Daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak hanya terbatas pada, ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif Indonesia menuju 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif tersebut, antara lain :

- 1) Kreativitas (*Creativity*)
- 2) Inovasi (*Innovation*)
- 3) Penemuan (*Invention*)

John Howkins (2011), menulis buku "*Creative Economy, How People Make Money From Ideas*" mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan. Atau dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dari itu, dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Untuk itu, dia menyebutkan paling tidak ada tiga konsep utama kreativitas ekonomi, yaitu sebagai berikut :

1. Kreativitas ekonomi menyangkut proses menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada.
2. Kreativitas ekonomi merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara-cara baru.

3. Kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana atau lebih baik.

Ekonomi Kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam menghasilkan pendapatan (*income generation*), menciptakan lapangan kerja (*job creation*), meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), meningkatkan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*), dan peran sosial lainnya. Oleh sebab itu, ekonomi kreatif dapat dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (*engine of economic growth and development*).

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata "Daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha, Mustangin, Dkk (2017). Sementara itu, Anwas (2013) menyebutkan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Sejalan dengan itu, Rappaport (dalam Hamill dan Stein, 2012), berpendapat bah pemberdayaan dianggap sebagai proses kolaboratif di mana orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian memadai, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Widayanti (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi concern publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan organisasi masyarakat melalui Organisasi masyarakat sipil. Demikian pula disampaikan Payne (dalam Adi, 2012) bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. Selain itu Makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas. Dimana pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sintang.

Sugiyono (2019) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam wilayahnya. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dilain pihak, (Bungin, 2017), menyampaikan pendapatnya mengenai penelitian kualitatif. Menurutnya, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata tertulis maupun lisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha berbasis ekonomi kreatif yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Sementara itu, sampelnya adalah warga yang bergerak di bidang kerajinan tangan seperti Tenun Ikat Dayak Desa di Rumah Betang Ensiad Panjang; warga yang bergerak dalam jasa transportasi seperti taksi di Bandara Tebelian dan warga yang bergerak di bidang pariwisata seperti perhotelan yang berada di bawah naungan Koperasi Tampun Juah Group.

Instrumen yang digunakan pada saat pengumpulan data di lapangan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul, ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat skunder. Data primer merupakan data yang dikutip langsung dari sumber utama, sedangkan data skunder merupakan data yang tidak dikutip langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, data primer mencakup hasil wawancara terhadap narasumber dari ketiga jenis penggerak ekonomi kreatif yang telah dipaparkan diatas. Untuk data skunder diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan mulai dari sebelum ke lapangan, pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan. Teknik yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan meliputi: menentukan tempat UMKM yang akan dikunjungi, memprediksi kendala yang mungkin dihadapi, membuat draf observasi dan pedoman wawancara serta perkiraan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai dokumentasi.

Teknik yang dilakukan setelah berada dilapangan meliputi: mengunjungi lokasi yang telah ditentukan, mengobservasi kegiatan yang dilakukan pemilik ekonomi kreatif, wawancara terhadap pemilik ataupun pengelola ekonomi kreatif. Selanjutnya, mendokumentasikan berbagai arsip yang mendukung seperti kain tenun, jadwal taksi dari dan ke Bandara Tebelian dan daftar tamu yang menginap di Ladja Hotel.

Teknik yang dilakukan setelah kembali dari lapangan meliputi: memeriksa seluruh data yang telah diperoleh guna disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Yang dianggap kurang relevan didelet supaya tidak mengganggu pada saat mendeskripsikan hasil final penelitian.

RESULTS

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai data mentah di lapangan, peneliti memaparkan beberapa permasalahan, berikut hasil akhir penelitiannya.

1. Bentuk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa bentuk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sintang. Bentuk-bentuk tersebut, antara lain: *Pertama*, Tenun Ikat Suku Dayak Desa yang ada di Rumah Betang Ensaid Panjang. Para pengerajin ini adalah wanita yang umumnya sudah berkeluarga. Namun, ada pula beberapa diantaranya yang belum. Bagi mereka yang belum

berkeluarga diharapkan suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus yang berupaya mempertahankan dan bahkan mengembangkan ekonomi kreatif ini.

Bahan-bahan yang digunakan untuk kain tenun ikat ini memanfaatkan apa yang ada di alam seperti daun Nenas dan akar Tengang (di dalamnya berserabut) yang kemudian dijadikan benang. Supaya benang tersebut bewarna (terutama warna merah), direbus bercampur dengan akar Mengkudu, kulit Pinang yang sudah matang, Fengkerebang, Langkar dan Takam. Setelah benangnya berwarna, kemudian dipintal dengan alat yang disebut sampai menjadi kain. Hasil akhirnya berupa selendang, pakaian adat, kumbu (selimut), tas, dan masker.

Kedua, jasa taksi di Bandara Tebelian. Jasa taksi ini adalah milik Koperasi Jasa Putra Mendalis yang beroperasi dengan melayani penumpang dari dan ke bandara. Selain itu, jasa taksi ini juga melayani penumpang ke beberapa kabupaten terdekat, seperti Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Tarif yang harus dibayar penumpang tergantung jarak tempuh. Misalnya, dari Bandara Tebelian menuju kota Sintang besarnya berkisar Rp 75.000. Dari Bandara menuju pusat Kabupaten Melawi berkisar Rp 150.000 dan dari Bandara menuju pusat Kabupaten Kapuas Hulu berkisar Rp 350.000.

Ketiga, jasa penginapan, berupa hotel. Hotel ini diberi nama "Ladja Hotel" yang dikelola koperasi jasa di bawah naungan Ladja Tampun Juah Group. Hotel Bintang Tiga ini diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada 13 Nopember 2016 yang lalu. Letaknya cukup strategis karena terletak di pusat Kota Sintang dan tidak jauh dari kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Ladja Hotel memiliki fasilitas yang tidak alah dengan hotel lainnya yang ada di Kota Sintang. Adapun fasilitas yang dimaksud, seperti 20 kamar tipe super deluxe, deluxe, supertwin single, balai ruang dan coffeshop, meeting room, room cafe dan massage

2. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Sintang

Ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha berbasis UMKM, antara lain: (a) memberikan tatanan regulasi dan birokrasi yang baik (b) seminar dan pelatihan berwirausaha (c) ajakan supaya masyarakat Kabupaten Sintang membuat usaha sendiri dan mengembangkannya (d) ~~memberikan pinjaman lunak melalui Bank Pembangunan Daerah, yakni Bank Kal-~~

Bar (c) memperkenalkan hasil produksi UMKM melalui media sosial yang diwadahi Kominfo dan Disperindakop (e) mempermudah proses ijin pendirian usaha bagi individu maupun kelompok yang akan mendirikan usaha, terutama yang berbasis home industry.

3. Tantangan yang dihadapi pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis UMKM

Mayoritas pemilik usaha kategori individu yang berbasis UMKM belum memiliki pembukuan yang begitu akuntabel, belum memiliki akses pemasaran yang luas, kualitas produk belum mampu bersaing dan sulitnya geografis yang harus ditempuh. Lemahnya kelembagaan pada Koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebageian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Selain itu, kurangnya lembaga pengembangan usaha, lembaga diklat dan inkubator serta terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama pada bahan baku, permodalan, teknologi serta informasi pasar.

Demikian pula dalam hal pelayanan kepada masyarakat relatif kurang ramah, sebab sistemnya masih berdasarkan sifat kedekatan ataupun saling kenal antara pengelola UMKM dengan masyarakat yang berkunjung maupun masyarakat yang menjadi penumpang (untuk pengelola taksi).

Maka dari itu, hasil penelitian ini merupakan dukungan terhadap penelitian sebelumnya. Artinya, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil, sejauh ini belum mampu memberdayakan masyarakat yang memiliki usaha kecil berbasis ekonomi kreatif. Alhasil, usaha tersebut sulit berkembang.

CONCLUSION AND SUGGESTION

1. Bentuk Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sintang
2. Setelah diadakan penelitian, peneliti menemukan beberapa bentuk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sintang yang dikelola masyarakat, antara lain: (1) Tenun Ikat Suku Dayak Desa yang ada di Rumah Betang Ensaied Panjang (2) Jasa taksi Bandara Tebelian (3) Jasa penginapan berupa Hotel Bintang Tiga.

3. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Sintang
4. Adapun peran pemerintah daerah, adalah sebagai berikut: (a) Memberikan tatanan regulasi dan birokrasi yang baik (b) Seminar dan pelatihan berwirausaha (c) Ajakan supaya masyarakat Kabupaten Sintang membuat usaha sendiri dan mengembangkannya (d) Memberikan pinjaman lunak melalui Bank Pembangunan Daerah, yakni Bank Kal-Bar (c) Memperkenalkan hasil produksi UMKM melalui media sosial yang diwadahi Kominfo dan Disperindakcop (e) Mempermudah proses ijin pendirian usaha bagi individu maupun kelompok yang akan mendirikan usaha, terutama yang berbasis home industry.
5. Tantangan yang dihadapi pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis UMKM
6. Ada beberapa tangan yang ditemukan, yakni: (1) UMKM mayoritas belum memiliki pembukuan yang akuntabel (2) Belum memiliki akses pemasaran yang luas (3) Produk yang dihasilkan belum mampu bersaing secara nasional dan internasional (4) Sulitnya kondisi geografis yang harus ditempuh (5) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi sebagai akibat pendidikan yang juga masih minim (6) Manajemen yang belum memadai (7) Sistem pelayanan kepada masyarakat relatif rendah.
7. Kiranya masih perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang permasalahan ekonomi kreatif di Kabupaten Sintang periode berikutnya supaya sistem manajemennya (meliputi pembukuan, permodalan, dan pelayanan) relatif baik. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, tentu diharapkan semua UMKM yang ada di Kabupaten Sintang akan berkembang. Sehingga, dapat menyerap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat perlahan tercapai.

BIBLIOGRAPHY

- Adi, I.R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwas. Oos.M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hamill, A.C & Stein, C.H. (2012). *Culture and Empowerment in the Deaf Community: An Analysis of Internet Weblog*. Jurnal of Community in Applied Social Psychology. Vol.21. Hal. 388-406.

Howkin, J. (2011). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Global.

Mustangin, Dkk. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*. Jurnal Pemikiran & Penelitian Sosiologi, Vol.2 No.1. Hal 63.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Purnomo, R.A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tersedia Online

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Widayanti, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*. Jurnal Welfare, Vol.1 No.1. Hal 87-102.

<https://agribisnis.co.id/industri-kreatif.2021>.

<http://www.widiasmoro.com/2014/10/16/ekonomi-kreatif-indonesia/>